



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dan mengacu kepada RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2020, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

Pelaihari, Maret 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	6
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III	22
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	22
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	23
3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB IV.....	29
PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)*	11
Tabel 2.2 Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi	20
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020	25
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Adalah merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu diperlukan suatu strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Tanah Laut sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai E-Government. Tantangan besar dalam implementasi E-Government terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ialah mewujudkan **Misi yang ke-3** yakni: *Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good government)*.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka dibuatlah misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat serta promosi potensi daerah guna mendukung dinamika

ekonomi;

2. Pemberdayaan teknologi informatika dengan bijak dan dinamis dalam menunjang pembangunan;
3. Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dalam upaya mendukung pengembangan potensi lokal.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2020, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLRI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2020.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; serta program dan kegiatan.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi), dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tahun 2017 dan realisasi Renja Tahun Berjalan 2019 dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Pencapaian Renstra SKPD.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)*

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	10				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	10	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
2	10	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	Baik	Baik
2	10	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayar	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	3 jenis	3	100
2	10	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	4 jenis	2	50
2	10	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang terpelihara	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7 unit	4	57

2	10	01	01	07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai 6000 dan 3000 yang tersedia	900 lembar	500 lembar	500 lembar	500 lembar	100	900 lembar	0	0
2	10	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	0	0
2	10	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	20 unit	0 unit	20 unit	0 unit	0	20 unit	5	25
2	10	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	40 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100	40 jenis	30	75
2	10	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	1	20
2	10	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	0	0
2	10	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	436 orang	350 orang	350 orang	350 orang	100	436 orang	80	18
2	10	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 SPPD	14 SPPD	14 SPPD	14 SPPD	100	30 SPPD	1	3
2	10	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah SPPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	304 SPPD	40 SPPD	40 SPPD	40 SPPD	100	304 SPPD	35	11
2	10	01	01	20	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah honorarium pegawai honorer/tidak tetap (PTT) yang terbayarkan	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	100	19 orang	19	100
2	10	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	45%	0%	15%	0%	0	45%	0	0
2	10	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	9 orang	0 orang	3 orang	0 orang	0	9 orang	0	0

2	10	01	18		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	Baik	50
2	10	01	18	01	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	1	50
2	10	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Dinas	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	Baik	25
2	10	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100	20 dokumen	5	25
2	10	01	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	27%	64%	27%	27%	100	27%	0	0
2	10	01	18	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina (aktif)	3 kelompok	7 Kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100	3 kelompok	0	0
2	10	01	20		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Cakupan layanan telekomunikasi	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100	2 buah	0	0
2	10	01	20	01	Kegiatan pemeliharaan menara repeater bidang kominfo	Jumlah pemeliharaan izin frekuensi radio komunikasi ke Kemenkominfo	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100	2 buah	0	0
2	10	01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang menerapkan e-government	64 %	55 %	35 %	55 %	156	64%	0	0

2	10	01	15	01	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD yang menerapkan e-government	4 SKPD	25 SKPD	16 SKPD	25 SKPD	156	4 SKPD	0	0
2	10	01	15	02	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah desiminasi informasi daerah melalui media	240 Infor masi/berita	240 inform asi/be rita	240 Infor masi/berita	240 Infor masi/berita	100	240 Infor masi/berita	20	8
2	10	01	15	03	Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi	Jumlah aplikasi penunjang E-Government yang dikembangkan	2 aplika si	4 aplika si	2 aplika si	2 aplika si	100	2 aplika si	0	0
2	10	01	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Ada	-	-
2	10	01	15	05	Penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral daerah	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	100	1 doku men	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi, telekomunikasi serta telematika dan pengelolaan data elektronik, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Kepala Dinas :

- 1) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Dinas;
- 3) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- 5) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi;
- 6) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan E-Government;
- 7) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis statistik dan persandian;

- 8) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Fungsi Kepala Dinas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

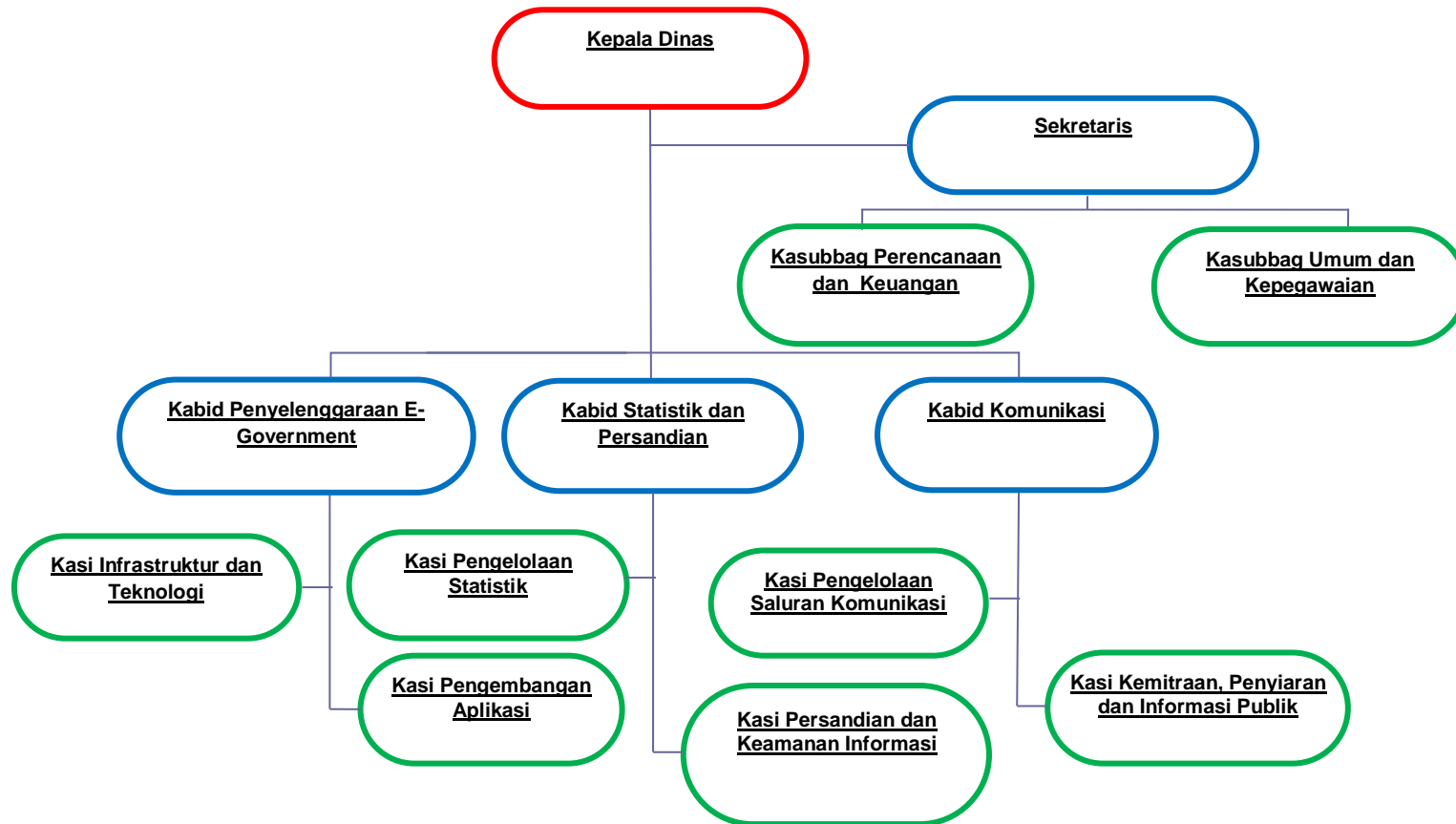
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub bagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Seksi, dengan struktur organisasi sebagai berikut:
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi membawahi :
 1. Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik
 2. Seksi Kemitraan Penyiaran dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi:
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi

- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 - 1. Seksi Pengelolaan Statistik
 - 2. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 sebagai berikut:



Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jumlah pada bulan Februari 2019:

No	Status	Jumlah
1	PNS	21
2	CPNS	-
3	PTT	9
Jumlah		30

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan target dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2

Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	5 KIM	6 KIM	3 KIM	3 KIM	3 KIM	7 KIM	3 KIM	3 KIM	Akan dilaksanakan pada tahun 2019 melalui layanan aplikasi e-lapor
2	Penyelenggaraan E-Government	Persentase SKPD yang menerapkan e-government	Jumlah SKPD yang menerapkan e-government	5 SKPD	8 SKPD	4 SKPD	4 SKPD	5 SKPD	25 SKPD	4 SKPD	4 SKPD	Menjadi salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan SPBE
3	Layanan pengelolaan statistik dan persandian	Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	Jumlah dokumen statistik sektoral daerah	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-

		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang menerapkan persandian	-	-	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	Pemakaia sandi dalam urusan pemerintahan terbatas pada hal yang sifatnya sensitive jadi penggunaannya diperlukan persetujuan langsung dari BSSN untuk monitoring
--	--	--	--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknonologi informatika (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.
2. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
- 2) Peningkatan peranan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi.
- 3) Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
- 4) Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

Isu-isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki

dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2018-2023
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Tanah Laut.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan dipecahkan dengan perancangan *road map* pembangunan infrastruktur E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1) Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City*

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memilki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

2) Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

3) Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah *e-Government*.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *E-Government* yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

4) Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

5) Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program- program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan- kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan musrenbang Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 untuk prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 tidak ada program atau kegiatan yang diusulkan (nihil) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut. Adapun usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4 Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tanah Laut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik- baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi Kepala Daerah yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari misi yang ada ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) melalui peningkatan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dari telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (3) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*)**. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merancang tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Laut
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut
Indikator : Persentase cakupan pengelolaan komunikasi publik
2. Tujuan 2 : Meningkatnya penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Tanah Laut
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan E-Governmet di Kabupaten Tanah Laut

- Indikator : Persentase cakupan penyelenggaraan E-Government
3. Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan statistik dan persandian di Kabupaten Tanah Laut
- Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan statistik dan persandian di Kabupaten Tanah Laut
- Indikator : Persentase cakupan layanan pengelolaan data statistik dan penerapan persandian

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2020 merupakan pelaksanaan operasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023, program dan kegiatan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun Anggaran 2020 dijabarkan menurut 3 (tiga) tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana setiap tujuan dijabarkan melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dituangkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	897.089.031			Baik	908.514.009
0	0	1			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Pelaihari	Jumlah jenis	4 jenis	98.922.437			4 jenis	101.890.110
0	0	1			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Pelaihari	Jumlah SPPD	388 SPPD	422.865.250			388 SPPD	431.322.555
0	0	1			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pelaihari	Jumlah orang	21 orang	375.301.344			19 orang	375.301.344
0	0	1			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	163.081.397			Baik	171.507.287
0	0	1			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Pelaihari	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana	80 jenis	55.436.397			80 jenis	60.980.037

0	0	1			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Pelaihari	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	40 unit	57.645.000			40 unit	60.527.250
0	0	1			Pembangunan gedung kantor	Pelaihari	Jumlah gedung kantor yang terbangun	0 gedung	-			0 gedung	0
0	0	1			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pelaihari	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	0 gedung	-			0 gedung	0
0	0	1			Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Pelaihari	Jumlah kepesertaan	10 orang	50.000.000			10 orang	50.000.000
0	0	1			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pelaihari	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang terbayarkan	0 orang	-			0 orang	0
0	0	1			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Luar Kabupat en Tanah Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	15.000.000			Baik	16.200.000
0	0	1			Kegiatan Pameran Pembangunan	Dalam Kabupat en Tanah Laut	Jumlah pameran terlaksana	1 kali	15.000.000			1 kali	16.200.000
0	0	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja		Nilai SAKIP	B	8.051.900			B	8.587.508
0	0	2			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD		Jumlah dokumen	3 dokumen	2.551.900			3 dokumen	2.551.900
					Penyusunan laporan keuangan		Jumlah dokumen	32 dokumen	5.000.000			32 dokumen	5.000.000
					Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja		Jumlah dokumen	4 laporan	500.000			4 laporan	1.035.608

1	6	15			Program Pengembangan Data/Informasi		Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	Ada	32.500.000			Ada	35.750.000
1	6	15			Penyusunan profile daerah	Kabuapa ten Tanah Laut	Jumlah dokumen statistik sektoral daerah (Profil Hasil Pembangunan/Data Terpadu)	1 dokumen	32.500.000			1 dokumen	35.750.000
1	20	31			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	2,4 persen	40.000.000			2,4 persen	43.200.000
1	20	31			Fasilitasi persandian dan pengamanan informasi	Pelaihari	Jumlah layanan persandian/keamanan informasi	150 layanan	40.000.000			160 layanan	43.200.000
1	25	18			Program Pengelolaan Komunikasi Publik		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	27 persen	570.336.872			27 persen	620.841.556
1	25	18			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Pelaihari	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	3 kelompok	508.261.872			3 kelompok	552.559.056
1	25	0			Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kabupat en Tanah Laut	Jumlah dokumen layanan jaringan komunikasi publik	1 dokumen	62.075.000			1 dokumen	68.282.500
1	25	15			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase SKPD yang menerapkan e-government	8,9 persen	1.011.420.800			8,9 persen	1.111.009.640
1	25	15			Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kabupat en Tanah Laut	Jumlah SKPD yang menerapkan e-government	4 SKPD	856.096.800		Rencana aksi Pemberantasan Korupsi untuk membangun pemerintahan yang bersih melalui	4 SKPD	941.706.480

										teknologi informasi dan pelayanan berbasis jaringan (networking) sampai dengan kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dan Penunjang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
1	25	15			Penyusunan aplikasi sistem informasi dan inventarisasi data informasi	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah aplikasi penunjang E-Government yang dikembangkan	2 aplikasi	155.324.000		Pemanfaatan E-Government untuk pelayanan publik, percepatan implementasi SPBE, Peningkatan kualitas data, Pengawasan dan pelaporan data	2 aplikasi	169.303.160
							JUMLAH		2.737.480.000				2.915.610.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaihari, Maret 2019
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,


Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001